KEBUTUHAN LAHAN PERTANIAN MINIMUM DI DESA NAGRAK SELATAN KECAMATAN NAGRAK KABUPATEN SUKABUMI

MINIMUM AGRICULTURAL LAND REQUIREMENT IN NAGRAK SELATAN VILLAGE, NAGRAK DISTRICT, SUKABUMI REGENCY

Dwi Suprastyo

Puslitbang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
dwis.supra@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu isu strategis di bidang pertanahan adalah sempitnya pemilikan lahan pertanian. Hal ini terjadi karena semakin mengecilnya lahan yang dimiliki oleh petani. Luasan pemilikan lahan pertanian merupakan isu strategis di bidang pertanahan selain isu jaminan kepastian hukum hak masyarakat atas lahan, kinerja pelayanan pertanahan dan ketersediaan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Sempitnya pemilikan lahan terjadi karena semakin mengecilnya lahan yang dikuasai dan dimiliki petani akibat pesatnya pembangunan dan pertambahan jumlah penduduk yang mengarah kepada ketidakadilan. Gejala ini dapat diketahui dari akumulasi lahan pertanian yang berlebihan, pemecahan bidang lahan pertanian, dan perubahan penggunaan lahan pertanian ke non pertanian, sehingga pemilikan lahan pertanian semakin menyempit bahkan mencapai luas kurang dari 0,5 ha (gurem).

Penelitian ini bertujuan untuk kebutuhan lahan minimum yang dapat menopang kehidupan layak bagi satu rumah tangga petani di Desa Nagrak Selatan Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis usahatani dan analisis kebutuhan lahan minimum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dibutuhkan lahan seluas 7.429,57 m² atau sekitar 0,74 ha untuk bisa hidup layak dengan jumlah anggota satu keluarga petani yang berjumlah 4 orang dengan harga gabah Rp.3.500,- dan tingkat produktivitas 0,98 kg/m². Upaya-upaya yang dapat dilakukan agar petani dan keluarganya dapat mencapai tingkat kehidupan layaknya adalah melalui redistribusi agar memiliki lahan seluas yang dibutuhkan minimum dan mencegah terjadinya konversi lahan. Mengingat pendapatan petani yang diterima relatif kecil, maka dianjurkan kepada petani untuk menerapkan intensifikasi pada usaha taninya secara menyeluruh dan menciptakan peluang usaha baru. Sehingga dengan luas lahan yang tetap, dapat meningkatkan hasil produksinya yang berdampak meningkatkan pendapatannya.

Kata kunci : pemilikan lahan, pendapatan, redistribusi.

ABSTRAK

One of the strategic issues in the land sector is the narrow ownership of agricultural land. This happens because of the smaller land owned by farmers. The extent of ownership of agricultural land is a strategic issue in the field of land besides the issue of guaranteeing legal certainty of community rights to land, the performance of land services and the availability of land for development for the public interest. The narrowness of land ownership occurs because of the decreasing amount of land that is controlled and owned by farmers due to the rapid development and population growth which leads to injustice. These symptoms can be seen from the excessive accumulation of agricultural land, the breakdown of fields of agricultural land, and changes in the use of agricultural land to non-agriculture, so that the ownership of agricultural land has narrowed and even

reached an area of less than 0.5 ha (small).

This study aims at the minimum land requirements that can sustain a decent life for one farmer household in South Nagrak Village, Nagrak District, Sukabumi Regency. The data obtained were analyzed using farm analysis and minimum land requirements analysis. The results of the study concluded that it takes an area of 7,429.57 m² or about 0.74 ha to be able to live properly with the number of members of one farmer family, amounting to 4 people with grain prices of Rp. 3,500, and productivity levels of 0.98 kg / m². Efforts that can be made so that farmers and their families can achieve a decent level of life are through redistribution so that they have the minimum land area needed and prevent land conversion. Considering that farmers' income is relatively small, it is recommended that farmers apply intensification to their farming as a whole and create new business opportunities. So that with a fixed land area, it can increase its production results which have an impact on increasing its income.

Keywords : land tenure, income, redistribution

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Luas kepemilikan tanah pertanian sudah diatur dalam Undang Undang Nomor 56 Prp. tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Penguasaan dan kepemilikan tanah pertanian yang ditetapkan dalam UU tersebut sebesar minimum 2 hektar per keluarga petani. Namun luas tanah pertanian minimum yang telah ditetapkan untuk petani dalam kebijakan tersebut belum dapat diwujudkan seperti yang diharapkan. Upaya untuk mengatasi permasalahan penguasaan dan kepemilikan tanah pertanian telah dilakukan dengan menetapkan Kebijakan Pembaruan Agraria yang diamanatkan dalam Tap MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Kebijakan tersebut mengamanatkan penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani yang menguasai dan memiliki tanah pertanian Gurem merupakan salah satu agenda bidang pertanahan dalam RPJMN 2015-2019, melalui upaya meningkatkan akses Petani Gurem terhadap kepemilikan tanah pertanian dari rata-rata 0,3 ha menjadi 2 ha per Kepala Keluarga Petani. Di samping itu, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agraria yang

adil dan berkelanjutan melalui penataan ulang ketimpangan penguasaan kepemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah merupakan sasaran strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN tahun 2015 - 2019.

Perlu ditekankan lagi bahwa negara Indonesia merupakan negara berkembang, pembangunan disegala bidang termasuk pertanian belum mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Isu pembangunan di bidang pertanian saat ini bahwa semakin sempitnya luas penguasaan dan kepemilikan tanah pertanian oleh petani, adanya hubungan bahwa luas tanah pertanian akan berkontribusi pada kesejahteraan petani dan tidak dapat dipungkiri bahwa jenis penggunaan tanah pertanian juga berkontribusi pada pendapatan petani.

Permasalahan

Permasalahan dalam penelitian ini adalah berapa kebutuhan lahan minimum yang dapat menopang kehidupan layak bagi satu rumah tangga petani di Desa Nagrak Selatan Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi?

Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan lahan minimum yang dapat menopang kehidupan layak bagi satu rumah tangga petani di Desa Nagrak Selatan Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi.

Penerima Manfaat

Penerima manfaat informasi mengenai kebutuhan lahan minimum adalah instansi pemerintah yang berwenang di bidang pertanahan, pertanian, dan kesejahteraan petani serta para akademisi sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan.

Ruang Lingkup

Lingkup penelitian pada tanah pertanian yang diasumsikan berkontribusi langsung terhadap penghidupan rumah tangga petani.

Definisi Operasional

1. Tanah pertanian dalam penelitian ini adalah tanah yang diusahakan dalam kegiatan pertanian berupa sawah, kebun dan tegalan (pertanian tanah kering);
2. Rumah Tangga Petani adalah rumah tangga yang sekurang-kurangnya satu orang anggota rumah tangga melakukan kegiatan yang menghasilkan produk pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar untuk memperoleh pendapatan/keuntungan atas risiko sendiri. Kegiatan dimaksud meliputi bertani/berkebun, beternak ikan di kolam, karamba maupun tambak, menjadi nelayan, dan mengusahakan ternak/unggas.
3. Kesejahteraan rumah tangga petani adalah kondisi di mana anggota keluarga rumah tangga petani dalam keadaan makmur tercukupi kebutuhan dasar hidupnya.
4. Kebutuhan hidup layak adalah kebutuhan seseorang untuk hidup secara layak selama satu bulan.

Tinjauan Pustaka

Penetapan Luas Tanah Pertanian

Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada Pasal 7 menyatakan bahwa untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Upaya ini dilakukan dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan makmur dengan cara melarang penguasaan dan pemilikan tanah pertanian melampaui batas. Untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dimiliki oleh satu keluarga atau Badan Hukum. Penetapan batas maksimum dan batas minimum dilakukan melalui peraturan perundangan. Untuk tercapainya ketentuan batas minimum tanah tersebut akan dilaksanakan secara berangsur-angsur (Pasal 17 ayat (3) UUPA).

Luas maksimum dan minimum tanah pertanian ditetapkan dalam Undang-Undang 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Undang-Undang ini menyatakan bahwa seseorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik miliknya sendiri atau kepunyaan orang lain ataupun miliknya sendiri bersama kepunyaan orang lain, yang jumlah luasnya tidak melebihi batas maksimum yang telah ditentukan (Pasal 1 Undang-Undang No. 56 Tahun 1960). Luas maksimum tanah pertanian di suatu daerah ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Tersedianya tanah-tanah yang masih dapat dibagi,
2. Kepadatan penduduk,
3. Jenis-jenis dan kesuburan tanahnya (diadakan perbedaan antara sawah dan tanah kering, diperhatikan apakah ada perairan yang teratur atau tidak),
4. Besarnya udhata yang sebaik-baiknya (*"the best farmsize"*) menurut kemampuan satu keluarga, dengan mengerjakan beberapa buruh tani.

5. Tingkat kemajuan teknik pertanian sekarang ini Selain menetapkan luas maksimum, UUPA memandang perlu pula diadakannya penetapan luas minimum dengan tujuan supaya setiap keluarga petani mempunyai tanah yang cukup luasannya untuk dapat mencapai taraf penghidupan yang layak. Batas minimum luas tanah pertanian tersebut adalah 2 hektar, oleh karena itu pemerintah mengadakan usaha-usaha agar supaya petani sekeluarga memiliki tanah pertanian seluas batas minimum tersebut sesuai Pasal 8 UU 56 Tahun 1960. Untuk mencapai batas minimum tanah pertanian tersebut, masih terkendala oleh berbagai faktor yang belum memungkinkan, sehingga pelaksanaannya akan dilakukan secara berangsur-angsur (UUPA Pasal 17 ayat (4)), artinya akan diselenggarakan taraf demi taraf. Taraf permulaan penetapan minimum bertujuan untuk mencegah dilakukannya pemecahan tanah lebih lanjut, karena akan menjauhkan dari usaha untuk meningkatkan taraf hidup petani.

Untuk meningkatkan taraf hidup petani tidaklah hanya cukup dengan diadakannya penetapan luas maksimum dan minimum saja yang diikuti dengan pembagian kembali tanah-tanahnya yang melebihi maksimum. Agar supaya dapat dicapai hasil bagi sebagai yang diharapkan, maka perlu tindakan lain seperti pembukaan tanah-tanah pertanian baru, transmigrasi, industrialisasi, intensifikasi, kredit yang cukup pada waktunya dengan mudah dan murah serta tindakan lainnya.

Kebutuhan Hidup Minimum/ Garis Kemiskinan

Untuk mengukur kebutuhan hidup minimum, salah satunya mengacu kepada BPS yang menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah

penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

$$GK = GKM + GKNM$$

Keterangan:

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makanan

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang 30 memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut.

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Pemilihan jenis barang dan jasa non makanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola

konsumsi penduduk. Pada periode sebelum tahun 1993 terdiri dari 14 komoditi di perkotaan dan 12 komoditi di pedesaan. Sejak tahun 1998 terdiri dari 27 sub kelompok (51 jenis komoditi) di perkotaan dan 25 sub kelompok (47 jenis komoditi) di pedesaan. Nilai kebutuhan minimum perkomoditi/sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKP 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibanding data Susenas Modul Konsumsi. Kebutuhan hidup minimum yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini sudah tersedia pada data BPS. Data yang digunakan adalah hasil perhitungan BPS 2015 untuk di Kabupaten/Kota.

Di samping menggunakan patokan kebutuhan hidup dasar untuk menentukan tingkatan pendapatan yang bisa menopang kehidupan rumah tangga petani, juga digunakan data kebutuhan hidup layak untuk seorang pekerja yang dipakai untuk menentukan upah minimum kabupaten/kota. Di mana kebutuhan hidup layak tersebut ditentukan berdasarkan komponen-komponen yang disetujui oleh dewan pengupahan kabupaten/kota setempat. Data kebutuhan hidup layak yang digunakan adalah data dari BPS untuk Provinsi tahun 2016.

Kerangka Pemikiran

Konsep struktur agraria erat kaitannya dengan distribusi kepemilikan tanah dan sistem tenurial. Karena struktur agraria adalah suatu fakta yang menunjuk kepada fakta kehadiran minoritas golongan atau lapisan sosial yang menguasai tanah yang luas di satu pihak dan mayoritas golongan yang menguasai hanya sedikit atau bahkan tanpa tanah sama sekali di lain pihak (Tjondronegoro, 1999).

Kepemilikan tanah dapat diperoleh dari warisan dan transaksi jual beli. Dalam distribusi kepemilikan tanah sawah, terdapat golongan luas kepemilikan tanah sawah. Pada setiap golongan luas kepemilikan tanah sawah tersebut, dalam pengelolaan tanahnya menerapkan sistem tenurial tertentu. Sistem tenurial merupakan pola penguasaan tanah yang didalamnya meliputi hubungan sewa, sakap dan gadai serta bentuk – bentuk pemilikan tanah secara komunal maupun perseorangan. Pola penguasaan tanah dapat diketahui dari pemilikan tanah dan bagaimana tanah tersebut diakses oleh orang lain.

Dalam perkembangannya, sistem tenurial mengalami perubahan pada segi penerapan dan kecenderungannya. Awal abad ke-20 kepemilikan tanah di pedesaan Jawa cenderung komunal, namun pada saat sekarang ini kepemilikan komunal jarang dijumpai. Kepemilikan tanah menjadi cenderung perseorangan. Selain itu, dari segi penguasaan tanah pada saat sekarang ini secara garis besar, lebih cenderung menerapkan sistem sewa. Perubahan tersebut disebabkan oleh masuknya kapitalisme dan komersialisasi pertanian di pedesaan.

Gambar 1 : Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk mengetahui gambaran rumah tangga petani dan perannya dalam penentuan luas tanah pertanian dan metode kuantitatif untuk menghitung kebutuhan tanah pertanian tiap rumah tangga petani.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diambil secara purposive yaitu di Desa Nagrak Selatan Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi.

2. Responden

Populasi dari penelitian ini adalah masyarakat yang memiliki tanah pertanian. Sampel responden menggunakan metode acak, yaitu pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi berpeluang menjadi sampel. Menurut Singarimbun dan Sofian (1995), data yang dianalisis harus menggunakan jumlah sampel yang cukup besar sehingga dapat mengikuti

distribusi normal. Sampel yang mengikuti distribusi normal adalah sampel yang jumlahnya lebih besar atau sama dengan 30. Penetapan ukuran contoh seperti ini agar mudah menggunakan analisis statistika yang standar karena menurut teori limit pusat, *dugaan rata-rata akan mendekati sebaran normal*. Berdasarkan pertimbangan tersebut, jumlah sampel pada penelitian ini adalah 35 petani pemilik tanah pertanian

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari data hasil wawancara (*depth interview*) dengan responden. Data sekunder bersumber dari data BPS terutama untuk data gambaran kondisi wilayah penelitian, seperti data luas dan batas wilayah serta kependudukan serta data lain yang diperlukan dalam penelitian.

4. Analisis Data

a. Analisis Pendapatan Usahatani

Penerimaan total rumah tangga petani dari usahatani yaitu harga produk dikalikan dengan total produksi periode tertentu. Total biaya atau pengeluaran adalah semua nilai faktor produksi yang dipergunakan untuk menghasilkan suatu produk dalam periode tertentu. Pendapatan total usahatani merupakan selisih antara penerimaan total dengan pengeluaran total (Soekartawi 1995).

Besarnya pendapatan usahatani dari petani sangat tergantung dengan besarnya penerimaan yang didapat. Penerimaan dihitung dengan cara:

$$TR = P \times Q$$

Keterangan:

TR = Total penerimaan (Rp)

P = Harga barang (Rp/Kg)

Q = Jumlah produksi (Kg)

Pendapatan petani dari usahataniannya dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Pd = TR - TC$$

Keterangan:

Pd = Pendapatan rumah tangga petani (Rp)

TR = Total penerimaan (Rp)

TC = Total biaya (Rp)

$$\text{Pendapatan minimum} = [(\text{jumlah keluarga} \times \text{KHL}) \times 12 \text{ bulan}]$$

$$\text{Penerimaan minimum} = [\text{pendapatan minimum} + \text{biaya usahatani}]$$

$$\text{Produksi minimum} = [\text{penerimaan minimum} : \text{harga gabah}]$$

$$\text{Luas lahan minimum} = \frac{[\text{produksi minimum} : \text{rata-rata produksi/m}^2]}{\text{Jumlah musim tanam}}$$

Pendapatan petani dihitung berdasarkan biaya tunai dan biaya tidak tunai atau biaya yang diperhitungkan. Biaya tunai digunakan untuk melihat seberapa besar likuiditas tunai yang dibutuhkan petani untuk menjalankan kegiatan usahataniannya. Biaya tidak tunai digunakan untuk menghitung berapa sebenarnya pendapatan jika penyusutan, sewa tanah dan tenaga kerja keluarga ikut diperhitungkan.

b. Analisis Perhitungan Kebutuhan Lahan Minimum

Dalam penelitian ini dilakukan penghitungan kebutuhan lahan minimum yang dapat digunakan untuk menopang hidup layak dari satu rumah tangga petani. Perhitungan kebutuhan lahan minimum dengan menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

- 1) Satu rumah tangga petani terdiri dari empat orang anggota keluarga;
- 2) Kebutuhan hidup layak menggunakan standar dari BPS;
- 3) Harga gabah adalah gabah basah yang dijual setelah selesai dipanen;
- 4) Dihitung berdasarkan dua musim tanam (empat bulan) dengan IP = 200.

Untuk mengetahui berapa luasan lahan minimum yang dibutuhkan guna menopang kebutuhan hidup layak satu rumah tangga petani, digunakan rumus:

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keragaan Responden

Identitas petani sampel yang menjadi responden merupakan gambaran secara umum yang meliputi keadaan responden yaitu umur, pendidikan formal, jumlah anggota keluarga, dan rata-rata luas lahan garapan.

Tabel 1 : Keragaan Responden Petani di Desa Nagrak Selatan

No	Identitas Petani	Keterangan	
		Kisaran	Rata-rata
1.	Jumlah Petani Sampel	35	
2.	Umur (thn)	42 – 85	61,83
3.	Pendidikan (orang)		
	a. Tidak tamat SD	0	
	b. SD	29	
	c. SMP	3	
	d. SMA	3	
	e. Perguruan Tinggi	0	
	f. Tidak sekolah	0	
4.	Jumlah anggota keluarga (orang)	2 - 6	3,97
5.	Rata-rata luas lahan (m ²)	250 – 12.000	3.854

Identitas petani sampel pada penelitian di Desa Nagrak Selatan dapat dilihat pada Tabel 1. Dari data Tabel 1 dapat diketahui bahwa rata-rata umur petani sampel adalah 61,83 tahun dengan kisaran 42 – 85. Dapat dikatakan bahwa petani responden di Desa Nagrak Selatan masuk dalam kategori pasca produkti. Hal ini menunjukkan bahwa banyak generasi muda di desa ini yang kurang tertarik bekerja pada sektor pertanian. Dilihat dari pendidikan petani sampel, sebagian besar hanya tamat SD (29 orang), SMP (3 orang), dan SMA (3 orang). Jumlah anggota keluarga petani responden rata-rata adalah 4 orang. Luas lahan yang dimiliki oleh petani responden rata-rata berada di kisaran 3.854 m² atau 0,38 Ha.

Analisis Usahatani

Dari hasil pengolahan data, diperoleh informasi bahwa di Desa Nagrak Selatan mampu menghasilkan rata-rata sebesar 9.753 kg/ha/musim yang berarti juga bahwa tingkat produktivitas lahan di Desa Nagrak Selatan sebesar 0,98 kg/ m². Di wilayah Desa Nagrak Selatan mampu memproduksi cukup besar dikarenakan tanah pertanian di sana tergolong subur dengan pengairan sepanjang tahun yang lebih dari cukup. Sedangkan untuk desa lainnya tergolong tanah yang kurang kesuburannya dengan pengairan yang tidak sepanjang tahun teraliri.

Berdasarkan analisis, diperoleh data bahwa kisaran biaya produksi petani di Desa Nagrak Selatan berada di kisaran Rp350.000,00 hingga Rp6.000.000,00 / luasan/musim dengan rata-rata total biaya produksi usahatani jika dikonversi per hektar adalah sebesar Rp6.264.131,00/ha/musim. Biaya produksi terdiri dari biaya penggarapan, pemeliharaan dan sarana produksi usahatani yang digunakan. Sebagian besar petani responden di Desa Nagrak Selatan menggantungkan hidup dari usahatani. Sehingga wajarlah mereka untuk berupaya secara maksimal agar usahatani padi memperoleh hasil yang optimal. Salah satu upaya yang mereka lakukan untuk meningkatkan produksinya adalah dengan cara meningkatkan intensifikasi dari segi penggarapan dan penggunaan sarana produksi. Konsekuensi dari intensifikasi ini adalah biaya produksi menjadi lebih mahal.

Penerimaan usahatani merupakan hasil produksi dikalikan harga jual dalam bentuk gabah basah panen yang lebih sering dilakukan dalam praktik jual beli gabah di desa Nagrak Selatan. Dari hasil wawancara di lapangan, diketahui bahwa harga gabah basah panen pada saat penelitian ini dilakukan adalah sebesar Rp3.500,00/kg,- gabah basah panen. Harga gabah sangat berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesejahteraan petani padi (Wahed, 2015). Dari hasil analisis diketahui informasi

bahwa penerimaan usahatani berdasarkan hasil produksi di Desa Nagrak Selatan berada di kisaran Rp875.000,00 hingga Rp42.000.000,00 dengan rata-rata penerimaan usahatani jika dikonversi per hektar adalah sebesar Rp34.135.995,00/ha/musim.

Pendapatan usahatani adalah ukuran penghasilan yang diterima oleh petani dari usahataninya yang dihitung dari selisih antara penerimaan dengan biaya usahatani. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa pendapatan usahatani petani responden di Desa Nagrak Selatan berada di kisaran -Rp3.550.000,00 sampai dengan Rp39.000.000,00 dengan rata-rata jika dikonversi per hektar adalah sebesar Rp27.871.863,00/ha/musim.

Analisa Kebutuhn Lahan Minimum

Menurut Afrida dan Noor (2017) semakin luas pemilikan lahan, semakin besar kontribusi pendapatan sektor pertanian terhadap pendapatan total rumah tangga petani. Biaya yang digunakan dalam analisis usahatani ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh petani dalam mengelola usahataninya dalam satu musim. Komponen biaya yang dikeluarkan oleh petani antara lain biaya sarana produksi, biaya tenaga kerja, dan biaya panen hingga petani menjual hasil produksinya. Pada kenyataannya sebagian besar petani tidak memiliki lahan seluas 1 ha guna menopang kehidupan rumah tangganya. Pendapatan per bulan jika petani memiliki lahan seluas 1 ha menurut kriteria Badan Pusat Statistik (BPS) ternyata belum mampu menopang kehidupan rumah tangga petani untuk hidup layak di Desa Nagrak Selatan. Berdasarkan data BPS, bahwa ukuran Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Provinsi Jawa Barat adalah sebesar Rp946.689,00/jiwa/bulan. Sehingga jika rata-rata jumlah anggota keluarga petani responden di Desa Nagrak Selatan adalah 4 orang, maka untuk hidup layak selama 12 bulan dibutuhkan biaya sebesar Rp45.441.072,00 per keluarga.

Kenyataan di lokasi penelitian berdasarkan hasil penelitian dan analisis pendapatan, ternyata diperoleh fakta bahwa pendapatan per bulan petani dari hasil usahataninya berada di bawah angka biaya KHL dalam membiayai keluarganya. Dari hasil perhitungan, jika harga gabah berada di kisaran Rp3.500,00 maka luas lahan yang dibutuhkan satu rumah tangga petani untuk memenuhi kebutuhan hidup layaknya adalah 7.429,57 m². Perhitungan ini diperoleh jika diasumsikan sawah petani mampu memproduksi dua kali dalam setahun serta diperhitungkan pula biaya usahatani selama 2 musim tanam sebesar Rp.6.264.131,-/musim.

KESIMPULAN

Pendapatan per bulan jika petani memiliki lahan seluas 1 ha menurut kriteria Badan Pusat Statistik (BPS) ternyata sudah mampu menopang kehidupan rumah tangga petani untuk hidup layak di Desa Nagrak Selatan. Berdasarkan hasil analisis hanya dibutuhkan lahan seluas 7.429,57 m² atau sekitar 0,74 ha untuk bisa hidup layak dengan jumlah anggota satu keluarga petani yang berjumlah 4 orang dengan harga gabah Rp.3.500,- dan tingkat produktivitas 0,98 kg/m².

SARAN

Upaya-upaya yang dapat dilakukan agar petani dan keluarganya dapat mencapai tingkat kehidupan layaknya adalah melalui redistribusi agar memiliki lahan seluas yang dibutuhkan minimum dan mencegah terjadinya konversi lahan. Mengingat pendapatan petani yang diterima relatif kecil, maka dianjurkan kepada petani untuk menerapkan intensifikasi pada usahataninya secara menyeluruh. Sehingga dengan luas lahan yang tetap, dapat meningkatkan hasil produksinya yang berdampak meningkatkan pendapatannya. Upaya meningkatkan pendapatan petani juga dapat dilakukan dengan menciptakan peluang usaha baru di perdesaan agar petani dapat memperoleh tambahan pendapatan dari usaha lain di luar usahatani.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrida A, Trisna IN. 2017. *Analisis Pendapatan dan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Padi Sawah berdasarkan Luas Lahan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh*. 4(3).
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2013. *Sensus Pertanian 2013*. Jakarta (ID): BPS.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2016. *Tabel Dinamis Kehidupan Hidup Layak*. [Internet]. [diunduh 10 April 2017]. Tersedia pada: <http://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1212>
- [BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi. 2017. *Kabupaten Sukabumi dalam Angka*. Sukabumi (ID): BPS Kabupaten Sukabumi.
- [BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi. 2017. *Kecamatan Nagrak dalam Angka*. Sukabumi (ID): BPS Kabupaten Sukabumi.
- [Pemerintah RI] Pemerintah Republik Indonesia. 1960. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. Jakarta (ID): Sekretariat Negara.
- [Pemerintah RI] Pemerintah Republik Indonesia. 1960. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian*. Jakarta (ID): Sekretariat Negara.
- Tjondronegoro S. 1999. *Keping-Keping Sosiologi dari Pedesaan*. Jakarta (ID): Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Singarimbun M, Effendi S. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta (ID): PT. Pustaka LP3ES.
- Soekartawi. 1995. *Analisis Usahatani*. Jakarta (ID): UI Press.
- Wahed M. 2015. *Pengaruh Luas Lahan, Produksi, Ketahanan Pangan Dan Harga Gabah Terhadap Kesejahteraan Petani Padi Di Kabupaten Pasuruan*. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*. 7(1):68-74.